

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ruslan. 2013. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education. Yogyakarta.

Ahmad Fikri Hadin. 2013. *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Genta Press. Yogyakarta.

Bagir Manan. 2011. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.

Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.

Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Inu Kencana Syafie. 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Refika Aditama. Jakarta.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.

Leo Agustino. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Alfabeta Bandung. Bandung.

Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius. Yogyakarta.

Nurmayani. 2000. *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Putera Astomo. 2018. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Pers. Depok.

Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.



HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

brayanto. 2022. *Ilmu Negara Telaah Kepingan Sistematis G. Jellinek, Edisi Revisi*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

Sarundajang. 2012. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Sondang P. Siagian. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan ke-15*. Rineka Cipta. Jakarta.

Suriansyah Murhaini. 2014. *Manajemen Pegawai ASN Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sutrisno Hadi. 2002. *Metodologi Research*. Andi Offset. Yogyakarta.

Tanto Lailam. 2012. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Prident Media. Yogyakarta.

Artikel Jurnal

Arini Nur Annisa (dkk). "Government Supervision Of The Rights Fulfillment Of Housed Workers In The Transition Period". *Awang Long Law Review*. Vol. 5. No. 1. Tahun 2022.

Edison H Manurung dan Ina Heliany. "Peran Hukum dan Tantangan Penegak Hukum dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 1. No. 2. Tahun 2019.

Fadzlun Budi Sulisty Nugroho. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi". *Gorontalo Law Review*. Volume 2 No. 2. Tahun 2019.

Kezia M dkk. Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut Uu Nomor 9 Tahun 2015. *Lex Administratum*. Vol. VIII/No. 3. Tahun 2020.

Murni A snawati Safitri dan Firman. "Kesejahteraan Hewan dan Covid-19 di Indonesia: Terabaikan Masalah Hukum". *Hasanuddin Law Review*. Vol. 7. No. 1. Tahun 2021.



Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Masyarakatan Militer". Jurnal Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan. Vol. 1. No. 1. Tahun 2021.

Rahmat Hidayat dan T. N. Syamsah. "Analisis Penerapan Dan Penguatan Hukum Animal Welfare Pada Bisnis Sapi Di Indonesia". Jurnal Living Law. Vol. 7. No. 2. Tahun 2015.

Rizky Nurdiansyah dan Nadirsyah. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 3. No. 1. Tahun 2018.

Suparto Wijoyo. "Tata Kelola Pertambangan dalam Kerangka Indonesia Incorporated untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan". Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol. 4. No. 1. Tahun 2017.

Syihabudin. "Kajian terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia". Jurnal Hukum. Vol. 10 No. 23. Tahun 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



in Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha Dibidang Peternakan Dan Pengenaan Retribusi Atas Pemeriksaan Kesehatan Hewan Serta Daging Dalam Wilayah Kota Makassar

Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut Dan Kuku Dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut Dan Kuku Berbasis Kewilayahan

Disertasi

La Ode Bariun. 2015. "Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan". Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Makalah

Beni Kurnia Ilahi dan Haikal. Penguatan Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN dalam Keadaan Darurat Guna Mencegah Terjadinya Kerugian Negara. Simposium Nasional Keuangan Negara Tahun 2020.

Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri. Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah. Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik.

Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Artikel Internet

<https://sulsel.bps.go.id/indicator/24/1757/1/jumlah-pemotongan-ternak-menurut-jenis-ternak-dan-kabupaten-kota.html> diakses langsung melalui Badan Pusat Statistika Sulawesi Selatan

<https://bnpb.go.id/berita/pimpin-rapat-koordinasi-di-makassar-kasatgas-minta-nomda-sulsel-percepat-penuntasan-pmk> diakses langsung melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana
ihatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20230308/2742535/pe-antispasi-penularan-zoonosis-dan-infeksi-baru-di-indonesia/

